

**Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 Dalam
Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia**

TESIS

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



oleh :

DEKY VEVEN EXFANDA

NIM: R 100 080 052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2011

NOTA PEMBIMBING

Dr. AIDUL FITRICIADA AZHARI,SH.,M.Hum
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis saudara Deky Veven Exfanda

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengomentari dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama : DEKY VEVEN EXFANDA
Nim : R 100 080 052
Program studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul : IMPLIKASI PERGESERAN SISTEM PEMILU PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.22-24/PUU-
VI/2009 DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI di
INDONESIA

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamualaikum. Wr wb

Surakarta, 28 Mei 2011
Pembimbing Utama

Dr. AIDUL FITRICIADA
AZHARI,SH.,M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Khuzdzalifah Dimyati,SH.,M.Hum
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis saudara Deky Veven Exfanda

Kepada Yth:
Ketua Programn Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengomentari dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama : DEKY VEVEN EXFANDA
Nim : R 100 080 052
Program studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul : IMPLIKASI PERGESERAN SISTEM PEMILU PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.22-24/PUU-
VI/2009 DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI di
INDONESIA

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassallamualaikum. Wr wb

Surakarta, 28 Mei 2011

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Khuzdzalifah Dimyati,SH.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : DEKY VEVEN EXFANDA

Nim : R 100 080 052

Program studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Judul : IMPLIKASI PERGESERAN SISTEM PEMILU PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.22-24/PUU-
VI/2009 DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI di
INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini jiplakan maka gelar yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Surakarta, 28 Mei 2011

(DEKY VEVEN EXFANDA)

PERSEMBAHAN

Tesis ini, penulis persembahkan kepada :

1. IBU, IBU, IBU dan AYAHku tercinta atas doa, support dan penantiannya selama ini.
2. Kakak-kakakku dan adikku yang kusayangi dan kurindukan.
3. Alm.Adik Muhammad Ali Rozak
4. “ATA” Calon pendamping yang tercinta, yang selalu mensupport, dan menemani selama ini.
5. Almamaterku tempat aku memperoleh ilmu.
6. Almamaterku sebagai tempat aku bernaung dan bekerja sekarang.
7. Teman-temanku yang ada di CS; Bim”, Chandra, Suryo, Somad, Kisna, semuanya yang tak bisa saya sebut semua.
8. Teman-temanku Pasca UMS; Bpk.Didik,Ardhitama, Anton, yang selalu setia menemaniku ditiap konsultasi selama ini.
9. Para peserta didikku yang senantiasa selalu memberikan waktu dan mendoakan kelancaran tesis ini.

Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2009 mengubah sistem pemilu DPR dan DPRD yang membatalkan Pasal 214 yang membawa perubahan dalam ketatanegaraan kita. Penggunaan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih merupakan penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan rakyat, tetapi Putusan MK tersebut menyimpan sejumlah persoalan. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan presidensiil sekaligus meneguhkan implementasi *good governance*. Rumusan masalah: Bagaimanakah implikasi Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Indonesia terhadap sistem kepartaian? Bagaimanakah pengaruh Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2009 terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk mengetahui secara komprehensif efektivitas Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Indonesia terhadap sistem kepartaian, Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan Non-Doktrinal yang kualitatif. Putusan MK mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Putusan MK membawa perubahan dimana merupakan awal transisi sebagai upaya membawa proses demokrasi agar lebih baik. Tetapi sejumlah persoalan muncul yaitu mengesampingkan kepentingan partai politik dalam hal internal partai politik yang sudah ada dan sudah mapan misalkan: calon legislatif akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh dukungan konstituen. dalam hal ini akan memunculkan persaingan tidak sehat sesama calon legislatif. Partai politik masih dominan dalam hal *me-Recall* dan PAW anggotanya yang tidak sejalan dengan partai. Kebebasan anggota partai politik dalam menyuarakan hak-haknya dibelenggu oleh partai politik, dengan dalih untuk pengawasan dan kontrol terhadap anggotanya. Pelaksanaan pemilu sering kali dikaitkan dengan stabilitas pemerintahan. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif perlu didukung pula oleh sistem pemilu dan sistem kepartaian yang sederhana. Dengan sistem kepartaian sederhana akan dapat dihasilkan tingkat fragmentasi yang relatif rendah di parlemen, yang pada gilirannya dapat tercipta pengambilan keputusan yang tidak berlarut-larut. karena banyaknya partai politik peserta Pemilu akan berakibat sulitnya tercapai pemenang mayoritas.

Kata kunci; Pergeseran sistem pemilu 2009

Abstract:

The Constitutional Court Decision No. 22-24/PUU-VI/2009 changes the general election system of DPR and DPRD that cancels Article 214 which brings shift in our constitution. Using vote system in determining of the selected candidate is a highly appreciation to the people sovereignty, but the Constitutional Court Decision has some issues. The Institutionalized party system tends to increase political stability and effectiveness of presidential government as well as strengthen the implementation of good governance. The problem statements: How does the implication of the Constitutional Court Decision No.22-24/PUU-VI/2009 in legislative elections 2009 in Indonesia toward the party system? How does the influence of the Constitutional Court Decision No.22-24/PUU-VI/2009 toward government stability in Indonesia? The purposes of this study are to determine the effectiveness Constitutional Court Decision No.22-24/PUU-VI/2009 in legislative elections 2009 in Indonesia toward the party system comprehensively, to determine how the influence of the Constitutional Court Decision No.22-24/PUU-VI/2009 toward government stability in Indonesia.

The research method uses Qualitative Non-Doctrinal approach. The Constitutional Court Decision reflects the voice of people truly. The Constitutional Court Decision brings the shift where is the beginning of transition as an effort to bring the democratic process to be better. But some issues arise which exclude the interests of political party in term of internal political party who has existed and already established example: legislative candidates will perform many ways to obtain the support of constituents. In this case it will arise unfair competition among legislative candidates. Political party is still dominant in terms of Recall and PAWS its members who are not in line with the party. The Freedom of political party members in voicing their rights shackled by political party, ostensibly for supervision and control over its members. The general elections are often associated with government stability. In order to create a strong government, stable, and effective also need to be supported by the general election system and the simple party system. With a simple party system will be able to produce a relatively low level of fragmentation in the parliament, in turn can create the decisions that are not protracted. because of the many political parties in the general election will impact the difficulty to achieve majority winner.

Keywords: The shifting system of the 2009 election

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrokhim.

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta, yang memelihara seluruh makhluk, yang mengutus para Rosul (semoga sholawat serta salam terlimpahkan pada mereka), dan atas rahmat, hidayah dan barokah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia”**.

Ungkapan besar untuk menggambarkan tahap perkembangan demokrasi di negara kita sekarang ini ialah bahwa Indonesia sedang bereksperimen dengan demokrasi yang hakiki. Karena hakikatnya yang dinamis, maka demokrasi berwujud melalui tahapan demi tahapan untuk melaksanakannya. Salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi itu adalah dengan melaksanakan Pemilu. Untuk melaksanakan hal itu bukanlah perkara mudah. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan sebuah sistem atau tatanan yang berdemokratis. Percobaan itu mungkin saja mengandung kekeliruan, yang jika disikapi dengan benar akan amat bagus dan diperlukan sebagai pelajaran, untuk diambil hikmahnya. Namun kekeliruan itu tetap harus dicegah jangan sampai fatal, agar tidak menghancurkan model yang sementara ini sudah ada dalam genggamannya. Indonesia dibangun antara lain oleh imaginasi mengenai sebuah negara dan bangsa. Lewat proklamasi, para pendiri republik tercinta ini, khususnya Presiden Soekarno, sebenarnya tengah membayangkan berdirinya negara kebangsaan modern dengan model Amerika Serikat. Maka demokrasilah yang dipilih dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Wassallamualaikum Wr Wb

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	
Halaman Nota Pembimbing	ii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Moto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Abstrak	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Originalitas.....	11
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika.....	39
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	40
A. Demokrasi.....	40
B. Kedaulatan Rakyat	47
C. Teori Perwakilan.....	60
D. Partai Politik	64
E. Jenis Partai Politik.....	69
1. Pembentukan Partai Politik	73
2. Tujuan Partai Politik.....	75

3. Partisipasi Partai Politik	77
4. Pelembagaan Partai Politik.....	81
5. Fungsi Partai Politik	85
6. Kelemahan Partai Politik.....	87
F. Sistem Pemilu.....	89
G. Tinjauan Umum Tentang Sistem Kepartaian	100
H. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemerintahan.....	108
BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILU	117
A. Sejarah Pemilu Indonesia	117
B. Sistem Kepartaian	126
C. Sistem Pemilu	134
D. Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Untuk Percepatan Proses Pembangunan Nasional	145
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	150
A. Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/Puu -VI/2009 Terhadap Sistem Kepartaian	150
1. Sistem Pemilihan	154
2. Sistem Pemilu Legislatif 2009	161
3. Kedaulatan Partai atau Kedaulatan Rakyat	167
4. Penghitungan Suara	177
5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Suara Terbanyak	180
B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/Puu- Vi/2009 Terhadap Stabilitas Pemerintahan Di Indonesia	191
1. Sistem Kepartaian Sederhana	191
2. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	

Berdasarkan UUD 1945	199
3. Koalisi Sesat	203
4. Kelompok Penekan	206
5. Tidak ada Fokus Kekuasaan dalam Sistem Politik	215
BAB V. PENUTUP	218
A. Simpulan.	218
B. Saran.....	219
C. Rekomendasi	220
Daftar Pustaka	222